

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

ANALISIS KEMISKINAN ANAK BALITA PADA RUMAH TANGGA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

(ANALYSIS OF CHILDREN POVERTY IN HOUSEHOLDS IN WEST SUMATERA)

Nasri Bachtiar, Mora J.Rasbi, dan Rahmi Fahmi

Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

Korespondensi penulis: *nasrib@yahoo.com*

Abstract

The purpose of this study is to analyze factors that influence children poverty in West Sumatera Province based on household and parents characteristics. To address this issue, the 2013 National Socioeconomic Survey was derived from the Indonesian Statistics Agency and analyzed using logistic regression. Research results showed factors that significantly affected the probability of children fall into absolute poverty are low education level of parents, mother and head of household's employment status, location of residences in villages, and having more than one child. Policies on poverty alleviation have been implemented by the government. However, a more comprehensive effort particularly for family with children under-five needs to be taken into account.

Keywords: *Child Poverty, Birth Certificate, Exclusive Breastfeeding, Basic Immunization, Early Childhood Education*

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan anak Balita di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan karakteristik rumah tangga dan orang tua. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2013 dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pengolahan dan analisa data didasarkan pada persamaan regresi logistik. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi peluang anak Balita jatuh pada kondisi kemiskinan absolut adalah disebabkan karena rendahnya pendidikan, pekerjaan ibu dan kepala rumah tangga, status tinggal di wilayah pedesaan, dan memiliki Balita lebih dari satu orang. Intervensi kebijakan pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi diperlukan implementasi yang lebih komprehensif, dan berfokus pada keluarga miskin dengan anak Balita.

Kata Kunci: *Kemiskinan Anak, Akte Kelahiran, ASI Eksklusif, Imunisasi Dasar, Pendidikan Usia Dini*

PENDAHULUAN

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu program kerja yang disepakati dalam program *Sustainable Development Goals* (SDGs) disamping program-program lainnya. Program ini antara lain bertujuan untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan kaum perempuan dan anak-anak melalui peningkatan harapan hidup, status gizi dan kesehatan, serta akses terhadap pendidikan khususnya bagi anak-anak dibawah 5 tahun (Balita). Selain itu, program SDG'S yang merupakan kelanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) juga dapat memberikan

sebuah kerangka pemikiran bagi pengambil kebijakan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar anak, seperti akte kelahiran, ASI eksklusif, imunisasi lengkap dan partisipasi pendidikan prasekolah (PAUD) dapat terpenuhi (UNICEF, 2012).

Alkire dan Foster (2011) serta Sen (1996) mengemukakan bahwa kemiskinan secara umum dapat diukur melalui kondisi ekonomi, namun untuk memahami gambaran kemiskinan yang sesungguhnya ukuran kondisi ekonomi saja tidak cukup. Pendekatan yang terbaik untuk mengukur kemiskinan menurut ketiga ahli ini adalah melalui pendekatan *deprivasi*.

Menurut pendekatan ini, kemiskinan tidak hanya diukur dengan indikator pendapatan, tetapi juga dapat diukur dari berbagai dimensi lain yang mencerminkan kemiskinan sesungguhnya, seperti terbatasnya akses terhadap air bersih dan sanitasi, pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta pencatatan kelahiran.

UNICEF & SMERU (2013) mengemukakan lebih dari separuh anak-anak di negara berkembang tumbuh dalam kemiskinan. Kemiskinan ini membuat mereka kehilangan kemampuan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang, serta membuat anak-anak lebih rentan terhadap eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan stigmatisasi. Oleh karena itu, pembangunan bangsa ke depan tidak hanya menitikberatkan pada penduduk dewasa saja, tetapi juga pada kelompok anak-anak yang jumlahnya mencapai hampir sepertiga dari jumlah penduduk dunia.

Di Indonesia, persentase anak usia 0-6 tahun pada rumah tangga miskin (16,94 persen) lebih tinggi dibanding rumah tangga tidak miskin (12,96 persen). Sedangkan persentase penduduk usia 19 tahun ke atas (penduduk dewasa) pada rumah tangga miskin (56,34 persen) lebih rendah dibanding pada rumah tangga tidak miskin (64,78 persen) (BPS, 2013). Angka ini menunjukkan bahwa tidak setiap orang bisa memperoleh manfaat dari transformasi ekonomi yang terjadi di Indonesia dan anak-anak merupakan pihak yang paling banyak terkena dampak dari kemiskinan. Berdasarkan penelitian UNICEF & SMERU (2013) yang menggunakan data panel Susenas tahun 2009 yang menganalisis kemiskinan anak dari enam dimensi *deprivasi* yaitu dimensi pendidikan, kesehatan, partisipasi dalam dunia kerja, tempat tinggal, sanitasi, dan air, ditemukan bahwa hanya sekitar 18,3 persen anak Indonesia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, seperti akte kelahiran, ASI eksklusif, imunisasi lengkap dan partisipasi dalam pendidikan prasekolah (PAUD).

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang mengalami kemiskinan anak multidimensi. Dimensi-dimensi yang melanda anak di Sumatera Barat, seperti masalah kepemilikan akte kelahiran, kelengkapan lima imunisasi dasar, memperoleh ASI eksklusif, dan keikutsertaan dalam pendidikan anak usia dini (PAUD) cukup tinggi. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2012 yang dipublikasikan BPS pada Statistik Kesejahteraan Rakyat 2012, sebanyak 42,52 persen anak usia 0-4 tahun di Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki akte kelahiran. Selanjutnya hanya 53,06 persen anak usia 2-4 tahun yang mendapatkan ASI eksklusif. Ini sangat jauh dari target yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yaitu 80 persen (Pramono,

2014). Sementara itu, di Provinsi Sumatera Barat hanya 61,57 persen anak Balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Selanjutnya, hanya 8,7 persen rumah tangga miskin yang anaknya pernah mengikuti PAUD.

Kemiskinan pada anak sangat berkaitan dengan karakteristik orang tua dan rumah tangga dimana mereka tinggal. Hal ini seperti terungkap dalam kajian Nichols (2008) mengenai kaitan antara faktor keluarga dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan anak di Amerika Serikat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis apakah fluktuasi kemiskinan anak di Amerika Serikat dipengaruhi oleh variabel kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi, komposisi, dan jumlah anggota keluarga, serta perubahan perilaku bekerja orang tua dalam memperoleh penghasilan. Dengan menggunakan regresi logistik ditemukan bahwa faktor yang dominan memengaruhi kemiskinan anak adalah kondisi ekonomi keluarga yang terkendala karena adanya kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, ditemukan juga bahwa pendidikan dan pekerjaan orang tua mempengaruhi pula probabilitas anak menjadi miskin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemiskinan anak Balita pada rumah tangga di Propinsi Sumatera Barat. Secara lebih khusus, tujuan penelitian ini adalah: (1). Mengkaji kemiskinan anak yang berumur di bawah lima tahun (Balita) menurut karakteristik orang tua dan rumah tangga dimana anak Balita tersebut tinggal; (2). Menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi probabilitas kemiskinan absolut anak Balita di Provinsi Sumatera Barat.

KONSEP KEMISKINAN ANAK

Kemiskinan anak penting dipelajari karena didasarkan kepada kenyataan bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya (Bappenas, 2004). Hak-hak kebutuhan dasar tersebut antara lain adalah: (a). Terpenuhinya sandang dan pangan; (b). Kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup; (c). Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan (d). Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik (BPS, 2009).

Kemiskinan pada rumah tangga akan berdampak pada anak-anak yang tinggal di rumah tangga tersebut. Anak-anak merupakan kelompok umur yang paling rentan didera oleh kemiskinan dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Kemiskinan yang menimpa anak-anak

akan menyebabkan kerusakan jangka panjang, baik terhadap perkembangan mental anak maupun fisiknya. Hal ini pada gilirannya akan terus berlanjut pada generasi selanjutnya ketika mereka menjadi orang dewasa yang tetap terjebak dalam mata rantai kemiskinan dan tidak mampu memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka (Kumala *et.al*, 2013).

Secara umum tidak ada pendekatan yang sempurna untuk mengukur kemiskinan anak, semua tergantung pada ketersediaan data dan tujuan penelitian itu sendiri. Kemiskinan anak yang kompleks tentu memerlukan kebutuhan data yang kompleks juga karena harus meliputi faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan mental, fisik, emosional dan spiritual dari anak (Roelen dan Gassmann, 2008). Oleh karena itu, pendekatan pengukuran kemiskinan pada anak tidak boleh dipandang pada ukuran moneter saja, tapi juga melalui pendekatan multidimensi, seperti pendekatan pemenuhan hak asasi manusia, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pendekatan kemampuan anak.

Beberapa lembaga memberikan definisi kemiskinan anak dengan beberapa pendekatan sebagaimana dikutip UNICEF (2006). UNICEF (2006) dengan menggunakan pendekatan moneter menyatakan bahwa anak-anak yang hidup dalam kemiskinan (adalah mereka yang) mengalami perampasan material, sumber daya spiritual, dan emosional yang diperlukan untuk bertahan hidup, mengembangkan diri dan berkembang, sehingga mereka tidak dapat menikmati hak-hak mereka, mencapai potensi penuh mereka atau berpartisipasi sebagai anggota penuh dan setara dalam masyarakat. *The Christian Children's Fund (CCF)* pada tahun 2002 dengan menggunakan pendekatan *tangible component* (moneter yang didekati diprosi dengan menggunakan pendapatan atau pengeluaran untuk pemenuhan barang dan jasa) dan pendekatan *intangible component* (rasa aman, terhindar dari pelecehan dan kekerasan serta pengucilan sosial dalam masyarakat) mengemukakan bahwa anak yang mengalami kemiskinan merupakan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya, diperlakukan tidak sama dan merasa tidak aman dengan lingkungan tumbuh mereka. Selanjutnya, *The Childhood Poverty Research and Policy Center (CHIP)* pada tahun 2004 menggunakan pendekatan moneter dan mengkontribusikan pemenuhan HAM. Melalui pendekatan ini, kemiskinan anak merupakan keadaan dimana anak dan orang muda tumbuh tanpa akses ke berbagai jenis sumber daya yang penting bagi kesejahteraan dan pemenuhan potensi mereka. *Save The Children* (2003) dengan pendekatan moneter dan mendukung pendekatan HAM dalam mengatasi kemiskinan anak mengemukakan bahwa anak yang

mengalami kemiskinan merupakan anak yang tinggal dalam keluarga yang miskin.

Selanjutnya untuk mengukur tingkat kemiskinan anak Balita dipakai ukuran kemiskinan absolut (*absolute poverty*) pada anak. Ukuran kemiskinan absolut pada anak mengalami *deprivasi* pada beberapa dimensi kebutuhan dasar mereka sebagaimana yang dikemukakan oleh Roelen, Gassmann dan De Neubourg (2009). Ketiga ahli tersebut mendefinisikan anak yang mengalami kemiskinan absolut adalah anak-anak yang mengalami *deprivasi* pada dua atau lebih indikator dimensi kebutuhan dasarnya, seperti akte kelahiran, ASI eksklusif, imunisasi lengkap dan partisipasi pendidikan prasekolah (PAUD).

Penelitian tentang kemiskinan anak merupakan isu yang harus ditanggapi dengan serius, terutama bila dikaitkan dengan hak kebutuhan dasarnya. Kemiskinan anak pada penelitian ini difokuskan pada empat dimensi kebutuhan dasarnya, yaitu kepemilikan akte kelahiran, ASI eksklusif, kelengkapan imunisasi dasar, dan partisipasi pendidikan pra sekolah (PAUD). Untuk mengukur kemiskinan anak, penelitian ini memakai pendekatan kemiskinan absolut anak-anak Balita yang tidak terpenuhi minimal dua kebutuhan dasarnya sebagaimana yang dirumuskan oleh Roelen and Gassmann (2008):

jika , dimana 1 = miskin absolut, dan 0 = lainnya

Unit observasi dari penelitian ini adalah anak yang berumur kurang dari lima tahun (Balita) yang tinggal pada rumah tangga di Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan adalah *raw data* hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2013 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia khususnya untuk 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Untuk melihat tingkat pemenuhan kebutuhan dasar pada anak Balita menurut karakteristik orang tua dan rumah tangga, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan analisis tabulasi silang dan gambar/grafik. Karakteristik orang tua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan kepala rumah tangga, pendidikan ibu kandung, status pekerjaan kepala rumah tangga, kegiatan utama, dan lapangan usaha kepala rumah tangga. Sedangkan untuk karakteristik rumah tangga difokuskan pada wilayah tempat tinggal, kemiskinan rumah tangga, dan jumlah Balita yang tinggal dalam suatu rumah tangga dimana anak Balita tinggal.

Untuk menganalisis pengaruh karakteristik orang tua dan karakteristik rumah tangga terhadap kemiskinan absolut pada anak Balita digunakan model analisis regresi logistik. Model regresi logistik biasa digunakan

untuk melihat peluang (probabilitas) terjadinya suatu keadaan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang memengaruhinya, dan membandingkan risiko munculnya suatu keadaan sebagai akibat dari suatu faktor setelah memperhitungkan faktor-faktor lainnya dalam model. Model persamaan regresi logistik ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Hosmer & Lemeshow, 1989):

$$P = P(Y = 1) = \frac{S_0 + S_1X_1 + S_2X_2 + \dots + S_pX_p}{1 + \exp(S_0 + S_1X_1 + S_2X_2 + \dots + S_pX_p)}$$

Di mana $p(x)$ adalah peluang terjadinya $Y = 1$, atau dalam penelitian ini peluang seorang anak jatuh kepada kemiskinan absolut.

Dengan melakukan transformasi logit dari $p(x)$, didapat persamaan yang lebih sederhana yaitu:

$$g(x) = \ln \frac{f(x)}{1 - f(x)}$$

Persamaan tersebut merupakan fungsi linier dalam parameter-parameternya. Persamaan ini dijadikan model pengujian sebagai berikut:

$$G(x) = S_0 + S_1X_1 + S_2X_2 + \dots + S_pX_p$$

$$G(x) = \ln [p/(1-p)]$$

$\ln [p/(1-p)]$ adalah odds ratio

Dimana :

- p = persentase dari anak yang miskin
- $(1-p)$ = persentase dari anak yang tidak miskin
- 0 = konstanta
- i = koefisien regresi ($1, 2, \dots, p$)
- X_i = variabel bebas (X_1, X_2, \dots, X_p)

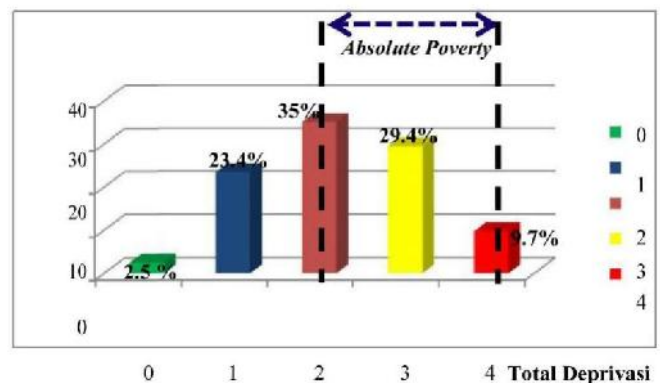
Tabel 1. Keterangan Variabel

No.	Ket. Variabel	Value label	Jenis Data
(1)	(2)	(3)	(4)
1	$Z(x)$ = Kemiskinan absolut Balita	= Miskin absolut, 0 = Tidak Miskin	Kateg orik
2	$PDDK_KRT$ = Pendidikan KRT	= SLTP ke atas, 0 = SD 1 ke bawah	Kateg orik
3	$PDDK_Ibu$ = Pendidikan Ibu	= SLTP ke atas, 0 = SD 1 ke bawah	Kateg orik
4	$KERJA_KRT$ = Status pekerjaan KRT	1 = formal, 0 = informal	Kateg orik
5	$StatusKerja_Ibu$ = Kegiatan u ibu	= tidak bekerja, 0 = 1 bekerja	Kateg orik
6	LU_KRT = Lapangan usaha KRT	= Non pertanian, 0 = 1 Pertanian	Kateg orik
7	$WILTING$ = Wilayah tempat tinggal	= Kota, 0 = 1 Desa	Kateg orik
8	RT_Miskin = Kemiskinan RT	1= RT tidak miskin, 0 = RT miskin	Kateg orik
9	J_BALITA = Jumlah Balita dalam RT	= 1 orang, 0 = Lebih dari 1	Kateg orik

Sebelum melakukan proses analisis dengan menggunakan *multiple logistic regression*, terlebih dahulu dilakukan uji korelasi terhadap variabel independen yang digunakan. Uji korelasi tersebut dilakukan dengan uji χ^2 atau uji korelasi terhadap korelasi Pearson. Bila di antara variabel independen yang digunakan mempunyai hubungan atau korelasi yang kuat, maka salah satu dari variabel independen tersebut harus dikeluarkan. Selanjutnya untuk menguji signifikan atau tidaknya koefisien variabel regresi logistik digunakan fungsi log likelihood (G). Jika $G > \chi^2$, berarti parameter model signifikan.

KEMISKINAN ANAK DAN FAKTOR YANG BERPENGARUH

Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, kemiskinan absolut pada anak Balita yaitu anak Balita yang terpapar pada dua dimensi atau lebih kebutuhan dasarnya (kepemilikan akte kelahiran, ASI eksklusif, imunisasi dasar lengkap, dan pendidikan pra sekolah). Dari pengolahan data Susenas tahun 2013 ditemukan bahwa terdapat 74,10 persen anak Balita di Provinsi Sumatera Barat menderita kemiskinan absolut. Sedangkan yang benar-benar terbebas dari deprivasi empat dimensi kebutuhan dasar hanya 2,50 persen atau dengan kata lain terpenuhi semua dimensi kebutuhan dasarnya. Angka ini mengindikasikan bahwa anak Balita di Sumatera Barat sangat banyak yang mengalami kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka.



Sumber: BPS, Susenas 2013 (diolah)

Grafik 1. Persentase Anak Balita yang Mengalami Deprivasi Kebutuhan Dasar di Provinsi Sumatera Barat

Tingkat pencapaian pemenuhan hak dasar bagi anak Balita pada rumah tangga di Sumatera Barat tahun 2013 dapat ditinjau berdasarkan masing-masing dimensi kebutuhan dasar sebagaimana yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Persentase Anak Balita Berdasarkan Indikator Pemenuhan Hak Dasar Anak Menurut Klasifikasi Wilayah Tempat Tinggal Provinsi Sumatera Barat, 2013

Indikator	Klasifikasi Wilayah Tempat Tinggal				Jumlah (Perkotaan+Perdesaan)	
	Perkotaan		Perdesaan		Ya	Tidak
	Ya	Tidak	Ya	Tidak		
Akte Kelahiran	76,3	23,7	52,9	47,1	62,7	37,3
ASI Eksklusif	59,7	40,3	56,6	43,4	57,9	42,1
Imunisasi Dasar Lengkap	51,3	48,7	52,0	48,0	51,7	48,3
PAUD	9,3	90,7	6,0	94,0	7,4	92,6

Catatan: Ya = terpenuhi, Tidak = tidak terpenuhi
 Sumber: BPS, Susenas 2013 (diolah)

Dari Tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa di Provinsi Sumatera Barat sekitar 76,3 persen anak Balita di wilayah perkotaan telah memiliki akte kelahiran, sedangkan di wilayah pedesaan hanya 52,9 persen. Sementara itu, untuk indikator pemenuhan ASI eksklusif, sebanyak 59,7 persen anak Balita di wilayah perkotaan telah memperoleh ASI eksklusif, sedangkan di wilayah pedesaan sebesar 56,6 persen. Indikasi ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar dilihat dari akte kelahiran terdapat perbedaan antara perkotaan dan pedesaan, sementara dalam pemenuhan ASI eksklusif tidak begitu berbeda.

Selanjutnya, untuk indikator imunisasi dasar lengkap, persentase pemenuhannya lebih tinggi di wilayah pedesaan (52,0 persen) dari pada perkotaan (51,3 persen). Untuk indikator pendidikan anak usia dini (PAUD), tingkat pemenuhan baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan sangat rendah. Hanya 9,30 persen anak Balita di wilayah perkotaan yang pernah mengikuti PAUD dan hanya 6,00 persen di wilayah pedesaan. Jika dilihat secara umum, tingkat pemenuhan kebutuhan dasar anak pada Balita di wilayah perkotaan lebih tinggi dari pada wilayah pedesaan kecuali untuk indikator imunisasi dasar. Indikator yang paling banyak terpenuhi adalah kepemilikan akte kelahiran, sedangkan yang paling sedikit yaitu indikator PAUD. Untuk melihat karakteristik kemiskinan absolut pada anak Balita, tingkat kemiskinan absolut pada anak Balita ditabulasi silang dengan variabel penjelas.

KARAKTERISTIK ORANG TUA DAN RUMAH TANGGA ANAK BALITA MISKIN ABSOLUT

Kemiskinan absolut pada anak Balita dapat dikaji lebih lanjut dengan mengaitkannya dengan karakteristik

orang tua dan karakteristik rumah tangga. Tabel 3 di bawah mendeskripsikan hubungan antara pendidikan kepala rumah tangga (KRT) dan pendidikan ibu dengan kemiskinan absolut pada anak Balita.

Tabel 3. Persentase Kemiskinan Absolut Pada Anak Balita Berdasarkan Tingkat Pendidikan Ibu dan Kepala Rumah tangga Di Provinsi Sumatera Barat, 2013

Tingkat Pendidikan KRT	Kemiskinan Absolut		Tingkat Pendidikan Ibu	Kemiskinan Absolut	
	Ya	Tidak		Ya	Tidak
SD Ke Bawah	47,3	34,4	SD Ke Bawah	36,4	20,8
SLTP Sederajat	19,0	20,5	SLTP Sederajat	20,7	20,9
SLTA Sederajat	27,1	34,3	SLTA Sederajat	29,8	36,9
PT	6,6	10,8	PT	13,1	21,4
Jumlah	100	100	Jumlah	100	100

Catatan: Ya = miskin, Tidak = tidak miskin
 Sumber: BPS, Susenas 2013 (diolah)

Dari Tabel 3 diketahui bahwa proporsi terbesar anak yang miskin absolut adalah anak Balita dengan KRT yang pendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 47,3 persen dan ibu yang juga pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 34,4 persen. Perbedaan proporsi tingkat kemiskinan absolut pada anak Balita menurut tingkat pendidikan KRT dan pendidikan ibu merupakan perbedaan yang signifikan (tingkat signifikansi 5% dengan nilai *chi-square* 51.704 dan *p-value* 0.000 (untuk pendidikan KRT) dan untuk pendidikan Ibu dengan nilai *chi-square* 88.481 dan *p-value* 0.000. Hal ini berarti terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan KRT dan pendidikan ibu dengan kemiskinan absolut pada anak Balita.

Selanjutnya, jika dihubungkan dengan karakteristik pekerjaan kepala rumah tangga (KRT), diketahui bahwa anak yang mengalami kemiskinan absolut kebanyakan berasal dari rumah tangga dengan KRT yang bekerja di sektor informal. Sedangkan jika dikaji menurut kegiatan utama ibu, anak yang tidak miskin absolut kebanyakan berasal dari ibu yang bekerja, yaitu sebesar 56,8 persen. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada kemiskinan absolut anak Balita menurut pekerjaan KRT dan partisipasi bekerja ibu, dengan tingkat signifikansi sebesar 5 persen. Hal ini ditandai dengan nilai *chi-square* 39.210 dan *p-value* 0.000, serta nilai *chi-square* 5.930 dan *p-value* 0.015 untuk status pekerjaan KRT dan kegiatan utama ibu.

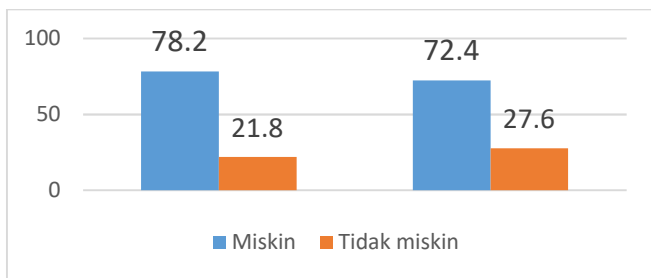
Tabel 4. Persentase Kemiskinan Absolut Pada Anak Balita Berdasarkan Pekerjaan Kepala Rumah Tangga dan Kegiatan Utama Ibu Di Provinsi Sumatera Barat, 2013

Status Pekerjaan KRT	Kemiskinan Absolut		Tingkat Pendidikan Ibu	Kemiskinan Absolut	
	Ya	Tidak		Ya	Tidak
Formal	34,3	46,2	Tidak Bekerja	48,0	43,2
Informal	65,7	53,8	Bekerja	52,0	56,8
Jumlah	100	100	Jumlah	100	100

Catatan: Ya = miskin, Tidak = tidak miskin
 Sumber: BPS, Susenas 2013 (diolah)

Pada Tabel 5 juga disajikan karakteristik kemiskinan absolut anak Balita menurut kemiskinan rumah tangga dimana anak Balita tinggal. Anak yang miskin absolut, 5,8 persen tinggal pada rumah tangga miskin. Sedangkan anak yang tidak miskin absolut, 7,6 persen tinggal pada rumah tangga miskin. Ke miskin absolut pada anak Balita tidak terdapat perbedaan menurut kemiskinan rumah tangga dimana anak Balita tinggal. Hal ini diketahui dari nilai *chi-square* sebesar 3.376 dengan *p-value* $0.066 < 0,05$. Ini berarti tidak terdapat hubungan antara kemiskinan absolut pada anak Balita dengan kemiskinan rumah tangga.

Sementara itu, berdasarkan pengolahan data yang disajikan pada Grafik 2 mendeskripsikan persentase kemiskinan absolut pada anak Balita menurut jumlah Balita dalam satu rumah tangga dimana anak Balita tinggal. Pada rumah tangga yang memiliki anak Balita lebih dari satu orang, 78,2 persen anak Balita yang tinggal di sana berada pada kondisi miskin, sedangkan pada rumah tangga yang memiliki anak Balita satu orang, 72,4 persen anak Balitanya berada pada kondisi miskin.



Sumber: BPS, Susenas 2013 (diolah)

Grafik 2. Persentase Kemiskinan Absolut Anak Balita Menurut Jumlah Balita dalam Rumah Tangga dimana Anak Balita Tinggal Di Provinsi Sumatera Barat, 2013

Perbedaan proporsi tingkat kemiskinan absolut pada anak Balita menurut jumlah Balita dalam rumah tangga dimana anak Balita tinggal merupakan perbedaan yang signifikan (tingkat signifikansi 5 persen) dengan nilai

chi-square 12 .385 dan *p-value* 0.000. Hal ini berarti terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah Balita dalam suatu rumah tangga dengan dengan kemiskinan absolut pada anak Balita. Banyaknya jumlah Balita dalam suatu rumah tangga mengindikasikan banyaknya beban tanggungan rumah tangga dalam merawat Balita dan juga menggambarkan jarak antara dua kelahiran yang bisa menjadi evaluasi untuk keberhasilan Program Keluarga Berencana (KB)

PENGARUH KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA TERHADAP KEMISKINAN ANAK

Untuk mengetahui kaitan antara karakteristik orang tua dan karakteristik rumah tangga terhadap kemiskinan absolut pada anak Balita dibangun model regresi logistik. Hasil *output* dari pengolahan data untuk model kemiskinan absolut pada anak Balita dengan SPSS dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Estimasi, Nilai Uji Wald, Signifikansi, dan Nilai Odds Ratio Dari Regresi Logistik Di Provinsi Sumatera Barat, 2013

Variabel	B	Wald	Sig.	Odds Ratio /Exp(B)
PDDK_KRT	-.206	4.849	.028	.814
PDDK_Ibu	-.620	34.528	.000	.704
KERJA_KRT	-.351	16.346	.000	1.222
StatusKerja_Ibu	.201	6.131	.013	1.097
LU_KRT	.093	.904	.342	.809
WILTING	-.212	5.726	.017	1.378
RT_Miskin	.321	4.109	.053	.701
J_Balita	-.355	15.094	.000	5.244
Constant	1.657	74.284	.000	.704

Sumber: BPS, Susenas 2013 (diolah)

Selanjutnya mengenai pengujian statistik, dilakukan uji kelayakan secara keseluruhan (*Overall Fit Test*) dengan menggunakan uji *Chi-square*. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan SPSS v.16 diperoleh nilai statistik *Chi-square* sebesar 136.572 dan *p-value* 0.000 yang jauh lebih kecil dai 0.05. Hal ini berarti dengan tingkat kepercayaan 95 persen minimal ada satu variabel bebas yang berpengaruh pada variabel terikat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model layak dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Selain pengujian secara *overall*, terdapat pula uji kecocokan model (*goodness of fit*) dari *Hosmer and Lemeshow*. Dari hasil pengolahan *Hosmer and Lemeshow Test* diperoleh nilai *Chi-square* 5.147 dan *p-value* atau *significant value* 0.742 yang jauh lebih besar dari 0.05. Hal ini menghasilkan kesimpulan dengan tingkat keyakinan 95 persen, dapat diyakini bahwa model regresi logistik yang digunakan telah cukup

mampu menjelaskan data/cocok, dengan kata lain model regresi logistik cocok dan layak dipakai untuk analisis selanjutnya karena tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.

Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada Tabel 6 diketahui bahwa hasil pendugaan parameter menunjukkan bahwa pendidikan kepala rumah tangga dan ibu, status pekerjaan kepala rumah tangga, kegiatan utama ibu, wilayah tempat tinggal, dan jumlah Balita berpengaruh signifikan terhadap peluang anak Balita berada pada kondisi kemiskinan absolut. Hal ini diketahui dari nilai *significant value* kecil dari 0.05 (Tabel 6). Hal yang menarik adalah jika mengkaji antara kemiskinan rumah tangga dengan kemiskinan absolut pada anak Balita secara makro (level nasional) memberikan gambaran hubungan yang positif dan signifikan sebagaimana hasil temuan dari Prasetyo (2010) yang menyatakan bahwa kemiskinan rumah tangga merupakan salah satu faktor yang berperan besar dalam timbulnya kemiskinan anak. Pengkajian hubungan tersebut secara mikro (level Sumatera Barat) memberikan hasil yang berbeda. Kondisi kemiskinan rumah tangga ternyata bukanlah faktor yang berpeluang menyebabkan anak Balita berada pada kondisi kemiskinan absolut karena kemiskinan rumah tangga memiliki nilai *significant value* $0.053 > 0.05$.

a. Pengaruh Pendidikan Kepala Rumah Tangga

Pendidikan kepala rumah tangga menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga yang berkaitan erat dengan tingkat pengetahuan. Kepala rumah tangga yang berpendidikan tinggi mengindikasikan tingkat pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang berpendidikan rendah. Hasil pengolahan menunjukkan nilai *odds ratio* sebesar 0,814, maka kemungkinan anak Balita yang pendidikan kepala rumah tangganya SLTP ke atas berpeluang menderita miskin absolut 0,814 kali dibandingkan dengan anak Balita yang pendidikan kepala rumah tangganya SD ke bawah. Nilai *odds ratio* kecil dari 1 (satu) berarti anak Balita yang lebih berpeluang mengalami miskin absolut adalah anak Balita yang kepala rumah tangganya berpendidikan SD ke bawah. Dengan kata lain peluang anak Balita yang kepala rumah tangganya berpendidikan SD ke bawah cenderung menjadi miskin absolut sebesar $1/0,814 = 1,229$ kali dibandingkan anak Balita yang pendidikan kepala rumah tangganya SLTP ke atas. Semakin rendah tingkat pendidikan kepala rumah tangga semakin tinggi peluang anak Balita menderita miskin absolut. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Puspongoro (2013), probabilitas kemiskinan anak Balita pada rumah

tangga dengan rata-rata pengeluaran yang terletak pada kuantil pertama tahun 2010 dipengaruhi oleh pendidikan ayah dan ibu.

Pendidikan juga merupakan hal yang sangat penting untuk pengentasan kemiskinan. Sirovátka dan Hora (2008) yang melakukan penelitian di Republik Ceko menggambarkan betapa pentingnya memerangi kemiskinan dari sisi pendidikan. Kemiskinan yang berlanjut antar generasi diindikasikan terjadi karena ketidakmampuan keluarga untuk mengirim anak mereka bersekolah. Dengan tidak bersekolahnya anak akan mendorong anak tersebut ke jurang kemiskinan ketika dewasa nanti karena tidak bisa bersaing di pasar kerja. Persaingan di pasar kerja membutuhkan tingkat pendidikan sesuai yang diminta pasar. Hal ini akan terus terjadi jika masalah pendidikan tidak dikelola dengan baik.

b. Pengaruh Pendidikan Ibu

Mayoritas masyarakat di Sumatera Barat menganut sistem garis keturunan ibu (matrilineal). Sosok ibu memiliki peranan penting dalam keluarga dan dalam pembinaan anak. Seorang ibu yang berpendidikan diharapkan mampu mengetahui kebutuhan anaknya dan mengetahui yang terbaik bagi anaknya. Dari nilai *odds ratio* sebesar 0,538, maka kemungkinan anak Balita yang pendidikan ibunya SLTP ke atas berpeluang menderita miskin absolut 0,538 kali dibandingkan dengan anak Balita yang pendidikan kepala rumah tangganya SD ke bawah. Nilai *odds ratio* kecil dari 1 (satu) berarti anak Balita yang lebih berpeluang mengalami miskin absolut adalah anak Balita yang ibunya berpendidikan SD ke bawah. Dengan kata lain peluang anak Balita yang ibunya berpendidikan SD ke bawah cenderung menjadi miskin absolut sebesar $1/0,538 = 1,859$ kali dibandingkan anak Balita yang pendidikan ibunya SLTP ke atas.

Temuan ini mengindikasikan bahwa pentingnya pendidikan bagi seorang ibu. Dengan berpendidikan yang tinggi, seorang ibu dapat mengetahui betapa pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar pada anak. Seorang ibu yang berpendidikan juga akan memiliki otonomi yang lebih besar dalam menentukan keputusan yang diambil dalam rumah tangga seperti keputusan dalam pendidikan dan kesehatan anak (Saputra, 2003).

c. Pengaruh Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga

Berdasarkan hasil regresi logistik, kepala rumah tangga di Provinsi Sumatera Barat yang bekerja di sektor formal memiliki risiko 0,704 kali untuk menjadikan

anak mereka miskin absolut dibandingkan kepala rumah tangga yang bekerja di sektor informal. Nilai *odds ratio* 0,704 yang kecil dari 0 (nol) memperlihatkan bahwa yang lebih berpeluang menyebabkan anak menjadi miskin absolut adalah kepala rumah tangga yang bekerja di sektor informal. Dengan demikian kepala rumah tangga yang bekerja di sektor informal berisiko $1/0,704 = 1,420$ kali anak mereka menderita miskin absolut dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang bekerja di sektor formal.

Pekerja sektor informal yang umum dijumpai di Indonesia ada kecenderungan untuk memiliki pendapatan yang rendah dan resiko ketidakpastian usaha yang tinggi sehingga sedikit untuk bisa diandalkan dalam membangun rumah tangga yang sejahtera. Sebagaimana dikemukakan oleh Hidayat (1978), pekerja di sektor informal bercirikan kegiatan usahanya tidak terorganisir dengan baik, tidak punya ijin usaha, teknologi bersifat primitif, serta modalnya kecil. Dengan demikian, dapat diindikasikan bahwa kepala rumah tangga yang bekerja di sektor informal akan cenderung menjadikan rumah tangga tersebut berada pada kondisi keterbatasan ekonomi. Apabila orang tua berada pada kondisi ekonomi yang terbatas akan berimbas kepada anak yaitu akan berkurangnya perhatian terhadap kebutuhan anak bahkan pada kondisi ekstrim. Dengan keadaan ini akan memaksa anak untuk bekerja membantu orang tua dan kehilangan masa kanak-kanak mereka (Usman, 2002).

d. Pengaruh Status Pekerjaan Ibu

Bekerja dalam penelitian ini memakai konsep bekerja menurut BPS. Bekerja merupakan melakukan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Seorang ibu dalam rumah tangga yang turut serta bekerja biasanya bertujuan untuk membantu menambah penghasilan rumah tangga dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga itu sendiri. Dari hasil pengolahan Susenas 2013, ibu dari anak Balita di Sumatera Barat sebanyak 53,2 persen bekerja. Berdasarkan hasil regresi logistik, peluang anak Balita yang ibunya tidak bekerja menjadi miskin absolut 1,222 kali dibandingkan dengan anak Balita yang ibunya tidak bekerja.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Dong (2015) pada rumah tangga di Indonesia, dimana ia meneliti keterkaitan antara *bargaining power* (daya tawar) wanita yang bekerja dalam pengambilan keputusan di rumah tangga. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa ada hubungan positif antara jam kerja pada seorang wanita dan daya tawarnya dalam pengambilan

keputusan di rumah tangga. Wanita yang bekerja memiliki peranan dan memiliki daya tawar dalam pengambilan keputusan seperti dalam hal pendidikan dan kesehatan anak. Jadi seorang ibu yang bekerja selain akan menambah penghasilan rumah tangga juga akan meningkatkan peranannya dalam pengambilan keputusan di rumah tangganya.

e. Pengaruh Tempat Tinggal

Keberadaan suatu rumah tangga berdasarkan tempat tinggal juga turut mempengaruhi faktor sosial ekonomi rumah tangga. Hal ini sebagaimana telah dikemukakan oleh Teori Ekologis Bronfenbrenner bahwa setiap periode perkembangan manusia berhubungan dengan berbagai faktor yang mendukung perkembangannya seperti lingkungan tempat tinggalnya. Dari hasil regresi logistik didapat nilai *odds ratio* 0,809. Ini artinya anak Balita yang tinggal di daerah pedesaan berisiko $1/0,809=1,236$ kali menderita miskin absolut dibandingkan dengan anak Balita yang tinggal di daerah perkotaan. Hal ini juga sejalan dengan temuan Puspongoro (2013), probabilitas kemiskinan anak Balita pada rumah tangga dengan rata-rata pengeluaran yang terletak pada kuantil pertama tahun 2008-2010 dipengaruhi oleh wilayah tempat tinggal.

Hal ini mengindikasikan masih terjadinya ketimpangan pembangunan fasilitas yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar anak Balita di Sumatera Barat. Perbedaan ketersediaan fasilitas terutama dalam hal informasi, pendidikan dan kesehatan akan menjadikan ketimpangan intelektualitas antara anak-anak pedesaan dengan perkotaan pada perkembangannya di masa mendatang.

f. Pengaruh Jumlah Anak

Banyaknya jumlah Balita dalam rumah tangga bisa menjadi cerminan tingkat keberhasilan program keluarga berencana dalam hal pengaturan jarak kelahiran. Semakin banyaknya Balita yang tinggal akan menambah semakin beratnya beban rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar anak Balita. Hasil regresi logistik menunjukkan nilai *odds ratio* sebesar 0,701. Maka probabilitas anak Balita yang tinggal pada rumah tangga yang memiliki Balita lebih dari 1 (satu) $1/0,701=1,427$ kali menjadi miskin absolut dibandingkan dengan anak Balita yang tinggal pada rumah tangga yang hanya memiliki satu anak Balita. Tingginya peluang yang terjadi pada rumah tangga yang memiliki Balita lebih dari satu anak menggambarkan bahwa pengaturan jarak kelahiran menjadi salah satu faktor yang dominan dalam terjadinya kemiskinan absolut pada anak.

KESIMPULAN

Anak Balita di Sumatera Barat sebesar 74,1 persen menderita kemiskinan absolut (terpapar pada dua dimensi atau lebih pada kebutuhan dasar). 25,9 persen yang tidak miskin secara absolut. Sebanyak 9,7 persen anak Balita terdeprivasi empat dimensi atau tidak terpenuhi satupun dari keempat kebutuhan dasarnya. Hanya 2,5 persen yang benar-benar terbebas dari deprivasi empat dimensi atau yang terpenuhi semua kebutuhan dasarnya. Dilihat dari masing-masing indikator kebutuhan dasar pada anak Balita, tingkat pencapaian tertinggi adalah kepemilikan akte kelahiran diikuti oleh tingkat pemenuhan ASI eksklusif dan imunisasi dasar lengkap. Sedangkan capaian terendah adalah partisipasi pendidikan pra sekolah (PAUD).

Menurut klasifikasi wilayah tempat tinggal, tingkat pemenuhan kebutuhan dasar pada Balita yang tinggal di wilayah perkotaan lebih tinggi dari pada yang tinggal di wilayah pedesaan kecuali untuk indikator imunisasi dasar lengkap. Dari hasil regresi logistik, faktor yang signifikan menyebabkan anak berpeluang berada pada kondisi kemiskinan absolut adalah pendidikan kepala rumah tangga, pendidikan ibu, status pekerjaan kepala rumah tangga, kegiatan utama ibu, wilayah tempat tinggal, dan jumlah Balita dalam rumah tangga.

Berkaitan hasil temuan, pengaruh pendidikan pada kepala rumah tangga maupun pada ibu signifikan terhadap kemiskinan anak pada Balita, maka hal ini hendaknya menjadi perhatian yang lebih serius bagi pemerintah. Pengentasan kemiskinan anak Balita dapat dimulai dengan adanya perbaikan tingkat pendidikan masyarakat terutama difokuskan pada generasi mendatang. Pendidikan dasar merupakan hak setiap warga negara. Pemerintah perlu menggalakkan lagi program wajib belajar sembilan tahun khususnya di Sumatera Barat sampai tuntas. Selain itu bagi yang sudah putus sekolah karena ketidakmauan mereka, diperlukan pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan agar mereka mandiri dan menjadi produktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala rumah tangga yang bekerja di sektor informal cenderung untuk memiliki anak yang miskin absolut. Untuk itu diperlukan peran pemerintah dalam membina pekerja di sektor informal. Perlu adanya pembinaan mengenai keahlian (*skill*), keterampilan dan dalam hal pemasaran. Selain itu juga pemerintah perlu membangun kemitraan dengan perbankan melalui paket UKM dan kredit lunak. Dengan demikian diharapkan sektor informal bisa maju dan bersaing sehingga bisa menjadi motor penggerak perekonomian khususnya di Sumatera Barat.

Selanjutnya seorang ibu yang bekerja cenderung anaknya tidak mengalami kemiskinan absolut dibanding ibu yang tidak bekerja. Untuk itu perlu kebijakan pengadaan lapangan kerja bagi perempuan, namun jam kerja dan pengupahannya harus memihak pada perempuan. Untuk itu perlu adanya pemberdayaan ekonomi kreatif dan responsif bagi ibu rumah tangga. Hal ini sejalan dengan penelitian Dong (2015) bahwa jumlah jam kerja pada seorang ibu dalam rumah tangga berhubungan positif dengan posisi tawarnya dalam pengambilan keputusan di rumah tangganya. Pengambilan keputusan ini termasuk dalam menentukan pendidikan dan kesehatan bagi anak.

Hasil temuan dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa anak Balita yang tinggal di wilayah pedesaan cenderung miskin absolut dibanding anak Balita yang tinggal di wilayah perkotaan. Untuk mengatasi hal ini kesenjangan antar desa dan kota harus dikurangi dengan cara mempercepat pembangunan pedesaan, terutama dalam penyediaan fasilitas kesehatan seperti pos kesehatan desa, pembangunan fasilitas sekolah dasar, dan pembangunan fasilitas pendidikan pra sekolah (PAUD) yang terjangkau bagi semua kalangan.

Banyaknya Balita berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan absolut pada anak Balita. Untuk itu, rekomendasi yang disarankan untuk hal ini yaitu lebih menggiatkan lagi program Keluarga Berencana dengan memberi layanan pada masyarakat berupa penyuluhan tentang pengaturan jarak antar kelahiran, dan pemberian alat kontrasepsi gratis. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah mengedukasi masyarakat melalui program wawasan GENRE (generasi berencana). Dengan demikian diharapkan akan terbentuk keluarga kecil yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkire, S., dan J.E. Foster . 2011. "Counting and multidimensional poverty measures". *Journal of Public Economics* 95 pp 476-487.
- Badan Pusat Statistik. 2009. *Data dan Informasi Kemiskinan 2008*. Jakarta: BPS.
- _____. 2013. *Survei Sosial Ekonomi Nasional 2013 Pedoman Pencacah*. Jakarta: BPS.
- _____. 2013. *Kajian Anak Pada Rumah Tangga Miskin*. Jakarta: BPS
- Bappenas. 2004. *Rencana Strategik Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Bappenas.BPS
- Provinsi Sumatera Barat. (2013). *Raw Data Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2013*. Padang: BPS Provinsi Sumatera Barat

- Dong, X. S. 2015. Do Working Women Have More Intra-Household Bargaining Power? - A Natural Experiment Approach Using Direct Measures of Intra-Household Bargaining Power. Australian National University. <https://sites.google.com/site/sarahxuedong/>. Diakses dari pada Tanggal 19 Agustus 2015, dari www.google.com: https://drive.google.com/file/d/0Bw_JJMG8xZwzSVRiM0ljS1ZKR1k/view
- Hidayat. 1978. Peranan Sektor Informal dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Keuangan Indonesia (EKI)* Vol. XXVI, No.4, Desember 1978.
- Kumala, Armelia Zukma, Haerani Natali Agustini, dan Rais. 2013. Dinamika Kemiskinan Pengukuran Kerentanan Kemiskinan Dalam Upaya Melindungi Anak-anak Dari Dampak Kemiskinan. *Child Poverty and Social Protection Conference*. Jakarta: UNICEF, BAPPENAS, Lembaga Penelitian SMERU.
- Nichols, Austin. 2008. *Understanding Recent Changes in Child Poverty*, New Federalism- Urban Institute.
- Prasetyo, H. 2010. *Determinan Deprivation dan Kemiskinan Anak di Indonesia*, Tesis. Depok : Program Pasca Sarjana Kependudukan dan Sumber Daya Manusia Universitas Indonesia.
- Puspongoro, Novi Hidayat. 2013. Kemiskinan Anak Usia Kurang Dari Lima Tahun Pada Rumah Tangga Dengan Rata-rata Pengeluaran Yang Terletak Pada Kuantil Pertama Tahun 2008-2009 Di Indonesia. *Child Poverty and Social Protection Conference*. Jakarta: UNICEF, BAPPENAS, Lembaga Penelitian SMERU.
- Roelen, Keetie & Gassmann, Franziska. 2008. 'Measuring Child Poverty & Well-Being: a literature review', Munich : Munich Personal RePec Archive., http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8981/1/MPRA_paper_8981.pdf.
- Roelen, Keetie, Franziska Gassmann, Chris de Neubourg 2009. *Child Poverty In Vietnam Providing Insights Using A Countryspecific & Multidimensional Model. Working paper MGSOG/2009/WP001*. Maastricht : Maastricht Graduate School of Governance, Maastricht University.
- Saputra, Muda. 2003. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Otonomi Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Dalam Rumah tangga*. Tesis. Depok : Program Pasca Sarjana Kependudukan dan Sumber Daya Manusia Universitas Indonesia.
- Sen, Amartya. 1996. *Development as Freedom*. Oxford : Oxford University Press, 1999.
- Sirovátka, Tomáš, Ond ej Hora. 2002, *Income poverty & material deprivation in the Czech Republic with focus on children*, Bratislava : Paper for the International Workshop Impact of Poverty & Social Exclusion on Children's Lives & Their Well-being.
- United Nations Children's Fund (UNICEF). 2012. *MDG, Keadilan dan Anak-anak: Jalan ke depan bagi Indonesia*. UNICEF Indonesia.
- _____. 2006. *Children Living In Poverty: Overview of Definition, Measurements and Policy*. Division of Policy and Planning. New York, USA: UNICEF.
- _____. dan SMERU. 2013. *Urgensi Penanggulangan Kemiskinan Multidimensi Pada Anak Di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Usman, Hardius. 2002. *Determinan dan Eksploitasi Pekerja Anak di Indonesia (Analsis Data Susenas 2000 KOR)*. Program Pasca Sarjana Kependudukan dan Sumber Daya Manusia Universitas Indonesia.